STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Richard Seran
NPP. 32.0669

Asdaf Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: Richardseran@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Bertha Lubis, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Malaka Regency is highly vulnerable to annual flood disasters, which have caused severe infrastructure damage, economic losses, and disruptions to community life. Although the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has implemented various efforts, the mitigation strategies have not yet proven fully effective in reducing the risks and impacts of flooding.* ***Objective:*** *To analyze the strategies of the Regional Disaster Management Agency in mitigating flood disasters in Malaka Regency.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants consist of BPBD leadership and officials, sub-district heads in flood-prone areas, and affected community members. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. Strategy formulation utilized SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).* ***Findings:*** *BPBD's mitigation strategies include public disaster awareness campaigns, the formation of Disaster Resilient Villages (Destana), and intersectoral coordination. However, the implementation faces several challenges such as low public awareness, inadequate infrastructure, and limited data. Regulatory support and cross-sector collaboration serve as key opportunities for strengthening the strategies.* ***Conclusion:*** *Flood mitigation strategies in Malaka Regency need to be reinforced by enhancing institutional capacity, promoting multi-stakeholder collaboration, and encouraging active community participation.* ***Keywords:*** *Mitigation, Strategy, Flood, BPBD, Malaka Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Malaka merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya, namun strategi mitigasi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menekan risiko dan dampak banjir. **Tujuan:** Menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Malaka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala dan pejabat struktural BPBD, camat wilayah rawan banjir, serta masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). **Hasil/Temuan:** Strategi mitigasi yang dilakukan BPBD antara lain sosialisasi kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta koordinasi dengan lintas sektor. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan data. Dukungan regulasi dan kerja sama lintas sektor menjadi peluang untuk penguatan strategi. **Kesimpulan:** Strategi mitigasi banjir oleh BPBD perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multipihak, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Kata Kunci: Mitigasi, Strategi, Banjir, BPBD, Kabupaten Malaka

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak di antara tiga lempeng tektonik besar dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta berada di wilayah tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Posisi geografis ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan (Suharto, 2004). Dalam konteks bencana hidrometeorologi (Kahn, 2005) menunjukkan bahwa korban bencana sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, kelembagaan, dan pendapatan nasional.

Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak bencana banjir. Secara topografi, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dan dilintasi Sungai Benanai, yang merupakan sungai terbesar di Pulau Timor bagian barat. Sungai ini kerap meluap pada musim hujan, yang memperbesar potensi banjir di wilayah sekitarnya (Rasdiana et al., 2021). Selain itu, curah hujan tahunan di Kabupaten Malaka berkisar antara 800–1600 mm, dengan kelembapan relatif sekitar 70%. Musim hujan berlangsung dari bulan Desember hingga April, yang menyebabkan meningkatnya risiko banjir, khususnya di Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Weliman.

Menurut Pramono, dkk. (2009), banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya/normal yang disebabkan oleh hujan yang turun secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh aliran sungai yang ada. Bencana banjir yang terus berulang berkaitan erat dengan faktor kesehatan publik, terutama di wilayah miskin dan terpapar iklim ekstrem (Haines et al., 2006) .

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Malaka telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, hingga korban jiwa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa banjir tahun 2021 menyebabkan 11 orang meninggal dunia, 4.326 hewan ternak mati, 795 rumah rusak berat, 3.480 rumah rusak ringan, 2.014 hektar sawah rusak, 12 ruas jalan dan 7 jembatan rusak. Dampak tersebut juga menimbulkan krisis pangan, air bersih, serta trauma psikologis bagi masyarakat terdampak.

Tabel 1.
Korban Banjir di Kabupaten Malaka Tahun 2020–2024

Tahun	Korban Terdampak
2020	1.430 orang
2021	35.925 orang
2022	15.000 orang
2023	1.185 orang
2024	4.323 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa banjir merupakan ancaman tahunan yang terus berulang di wilayah Kabupaten Malaka. Kejadian ini mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk melaksanakan berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kenyataannya, banjir tetap terjadi setiap tahun di daerah-daerah yang sama, bahkan dengan cakupan wilayah terdampak yang cukup luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Malaka belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap strategi-strategi mitigasi bencana banjir yang telah dilaksanakan, guna merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi risiko bencana banjir yang terus mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Malaka.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai penelitian tentang mitigasi bencana banjir telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, sebagian besar fokusnya masih berkisar pada aspek teknis seperti pembangunan infrastruktur atau koordinasi lintas instansi, tanpa mengkaji secara mendalam strategi kelembagaan di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Kabupaten Malaka. Padahal, Kabupaten Malaka memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi akibat kondisi topografi dataran rendah, curah hujan ekstrem, serta dilintasi oleh Sungai Benanai. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana menambah kompleksitas persoalan. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan sejumlah upaya mitigasi, banjir masih terjadi berulang setiap tahun dengan dampak signifikan, menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum optimal. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis strategi BPBD Kabupaten Malaka dalam mitigasi banjir dengan pendekatan analisis SWOT, sehingga menimbulkan kesenjangan yang perlu diisi melalui penelitian ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan berbagai perspektif terhadap pendekatan mitigasi bencana banjir di Indonesia, yang dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan strategi yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kondisi daerah penelitian. Misalnya, penelitian oleh Novendri Purba (2022) di Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi struktural seperti pembangunan dinding penahan

banjir dan bronjong telah diterapkan oleh pemerintah setempat. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Selanjutnya, Endah Mustika Ramdani (2015) dalam studinya di Kabupaten Bandung menyoroti permasalahan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan banjir. Temuannya mengungkap bahwa peran BPBD sebagai koordinator belum optimal akibat ketidaksamaan persepsi antar lembaga serta ketergantungan pada peraturan internal masing-masing instansi.

Dalam konteks berbeda, Alfian Fahrur Lukito (2014) meneliti mitigasi banjir di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dan menemukan bahwa mitigasi struktural dalam bentuk pembangunan saluran air merupakan solusi yang cukup efektif di tingkat lokal. Pendekatan teknis seperti ini menunjukkan dampak langsung dalam mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Sementara itu Nasyiruddin dan Badjido (2015) dalam penelitiannya di Kabupaten Bantaeng mengungkapkan bahwa strategi mitigasi diarahkan pada pembangunan waduk dan dinding pantai untuk menahan luapan air dari wilayah hulu. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, menghambat pencapaian tujuan mitigasi secara maksimal. Adapun Kusumajati dan Sri Arfiah (2016) menekankan pentingnya pendekatan non-struktural melalui peningkatan peran BPBD dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitiannya di Desa Windurejo menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang meningkat tentang risiko bencana dapat memperkuat ketahanan komunitas lokal terhadap banjir.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi bencana banjir sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan di setiap daerah. Walaupun pendekatan yang digunakan berbeda baik secara struktural maupun non-struktural semua penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, kebijakan yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, yang berfokus pada penguatan strategi mitigasi banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan memfokuskan pada strategi mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Malaka melalui pendekatan analisis SWOT secara komprehensif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan kelembagaan khas wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur. Tidak seperti penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek struktural atau koordinasi antar lembaga, studi ini secara khusus mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas strategi mitigasi di wilayah rawan banjir yang terpencil dan minim infrastruktur, serta menawarkan pendekatan integratif antara pemberdayaan masyarakat, penguatan regulasi lokal, dan kolaborasi lintas sektor berbasis potensi daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka dalam upaya mitigasi bencana banjir, dengan menyoroti sejauh mana strategi tersebut mampu mengurangi risiko

dan dampak banjir secara efektif di wilayah yang rawan bencana serta mengkaji kesesuaiannya dengan kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki daerah tersebut.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka dalam mitigasi bencana banjir. Menurut Sugiyono (2011:9), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti (Sugiyono, 2011:11). Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menggali secara mendalam proses, strategi, serta hambatan yang dihadapi oleh BPBD dalam implementasi mitigasi banjir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap data dan laporan terkait bencana banjir. Menurut Moleong (2012:186), wawancara mendalam merupakan salah satu teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif, karena memungkinkan peneliti menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dari situasi yang diteliti, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi (1993:93), bahwa observasi memungkinkan peneliti melihat langsung gejala sosial yang diteliti dalam konteks lingkungan alamiahnya. Studi dokumentasi juga digunakan, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:240), sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh data tertulis dari laporan-laporan resmi atau dokumen institusi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi strategi mitigasi yang diterapkan. Dalam konteks global, Fawzy et al. (2020) menekankan pentingnya strategi mitigasi iklim yang adaptif untuk menjawab tantangan risiko berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam terhadap pelaksanaan strategi mitigasi banjir. Menurut Sugiyono (2011:218), teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah Kepala BPBD, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, camat di daerah rawan banjir, serta perwakilan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip kebencanaan, dan publikasi lain yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Indrianto dan Supomo (2013:142) bahwa data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk tabel atau dokumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur untuk menggali informasi dari informan kunci mengenai strategi yang diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam mitigasi banjir. Menurut Moleong (2012:186), wawancara

semi-terstruktur memberi fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam, sambil tetap mengikuti pedoman umum. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi-lokasi rawan banjir guna melihat secara nyata kondisi lapangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi, sebagaimana diuraikan oleh Arikunto (2010:172) bahwa observasi memungkinkan peneliti memperoleh data dari tempat yang menggambarkan situasi nyata. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data tertulis atau visual seperti peta rawan banjir, laporan tahunan BPBD, serta data statistik kejadian banjir. Menurut Sugiyono (2011:240), dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang menyimpan data dari peristiwa yang telah terjadi, sehingga berguna sebagai pendukung validasi data lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Malaka

Strategi mitigasi bencana banjir yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka dianalisis menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).* Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal lembaga, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberhasilan implementasi strategi mitigasi.

Analisis SWOT dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi situasional, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan strategi adaptif yang dapat menjawab tantangan kebencanaan secara spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah Malaka. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah dataran rendah yang dialiri Sungai Benenai dan beberapa anak sungainya, menjadikan potensi banjir sebagai ancaman yang terus berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, strategi mitigasi tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor struktural, kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pemetaan terhadap kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) BPBD sebagai faktor internal memberikan gambaran sejauh mana kesiapan institusional dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, identifikasi terhadap peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) menjadi penting untuk melihat potensi sinergi sekaligus tantangan dari lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir strategis dalam penyusunan program mitigasi bencana berbasis risiko di Kabupaten Malaka.

Pendekatan SWOT yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan data primer melalui wawancara dengan pihak BPBD, perangkat desa, serta observasi langsung di lapangan, dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta referensi dari dinas terkait. Hasil analisis ini kemudian diuraikan dalam bagian berikut yang menjelaskan secara sistematis masing-masing indikator SWOT yang memengaruhi strategi mitigasi banjir di Kabupaten Malaka.

1. *Strength*

Faktor kekuatan merupakan elemen internal yang memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk

mendukung pencapaian tujuan strategis, baik dalam memanfaatkan peluang maupun mengatasi ancaman dari luar. Melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan, peneliti mengidentifikasi beberapa aspek yang menjadi kekuatan utama BPBD dalam pelaksanaan mitigasi banjir.

Salah satu kekuatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Malaka terletak pada kualitas sumber daya manusia. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa pegawai di BPBD Kabupaten Malaka sebagian besar merupakan lulusan SMA dan hanya sedikit yang lulusan S1, namun mereka sering dikirim untuk mengikuti pelatihan penyelamatan. Rata-rata pegawai sudah memiliki sertifikasi penyelamatan bencana dan dinilai kompeten dalam bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara pendidikan formal masih terbatas, namun dari segi pengalaman dan keahlian teknis, pegawai BPBD telah dibekali kemampuan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat dan menjalankan tugas mitigasi secara profesional.

Selain itu, sistem kerja yang diterapkan juga menjadi faktor kekuatan yang signifikan. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa ia sangat puas dengan sistem kerja yang ada karena komunikasi antar bagian selalu terjaga dengan baik. Ia menjelaskan bahwa semua tugas berjalan dengan lancar dan efisien karena adanya SOP yang jelas, koordinasi yang kuat antar bagian, serta dukungan antar rekan kerja yang solid. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Malaka telah membangun budaya kerja yang kooperatif dan sistematis, yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kombinasi antara kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sistem kerja yang efektif memberikan landasan kuat bagi BPBD dalam melaksanakan strategi mitigasi banjir. Hubungan kerja yang harmonis, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi internal yang baik menjadikan BPBD mampu menjalankan tugasnya dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan memaksimalkan kekuatan ini, BPBD Kabupaten Malaka berpotensi meningkatkan efektivitas mitigasi dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat terdampak banjir.

2. *Opportunity*

Faktor peluang merupakan elemen eksternal yang mendukung keberhasilan strategi mitigasi bencana banjir yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Malaka. Peluang ini berasal dari luar organisasi, namun dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program yang sedang dan akan dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci serta dokumentasi yang dilakukan peneliti, teridentifikasi beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi peluang strategis dalam upaya pengurangan risiko banjir di wilayah ini.

Salah satu peluang utama adalah adanya kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malaka menyampaikan bahwa selama ini BPBD selalu berkoordinasi dengan instansi lain seperti dinas PU dan dinas sosial dalam hal mitigasi dan penanganan bencana, dan kerja sama ini sudah terjalin dengan baik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris BPBD yang menjelaskan bahwa instansinya telah menjalin kerja sama dengan dinas PU dalam pembangunan tanggul dan saluran irigasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi lain sangat diperlukan karena BPBD tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak lain. Sinergi antarinstansi ini menjadi peluang penting dalam memperkuat pelaksanaan program mitigasi banjir secara menyeluruh.

Selain kerja sama antarinstansi, peluang lainnya datang dari keterlibatan pihak

swasta dalam mendukung program BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa pihak swasta telah memberikan dukungan dalam bentuk sarana, seperti tenda dan alat pemadam api ringan. Sekretaris BPBD juga menjelaskan bahwa meskipun bantuan dana dari pihak swasta tidak signifikan, namun mereka tetap berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh BPBD. Kerja sama ini menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung program kebencanaan, meskipun BPBD menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pihak swasta karena masing-masing memiliki kepentingan sendiri.

Peluang berikutnya berasal dari dukungan regulasi yang sejalan dengan program BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menyebutkan bahwa di sejumlah kecamatan dan desa, regulasi telah dibuat untuk mendukung program penanggulangan bencana, terutama dalam isu banjir. Hal ini juga disampaikan oleh Camat Malaka Tengah yang menjelaskan bahwa beberapa desa seperti Kamanasa sudah memiliki peraturan desa yang melarang masyarakat membuang sampah di sungai dan saluran air. Camat Kecamatan Weliman menyatakan bahwa desa seperti Kleseleon dan Uma'au telah memiliki dan menjalankan peraturan desa yang mendukung program BPBD. Hal serupa juga disampaikan oleh Camat Malaka Barat, yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam menangani banjir sebagai permasalahan bersama. Dengan adanya regulasi yang mendukung di tingkat kecamatan dan desa, BPBD memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk menjalankan program mitigasi secara lebih terstruktur dan partisipatif.

3. *Weakness*

Faktor kelemahan merupakan aspek internal yang menghambat kinerja dan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka dalam menjalankan program mitigasi bencana banjir. Kelemahan ini perlu diidentifikasi agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan tugas BPBD.

Sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi kelemahan utama yang dirasakan langsung oleh para pegawai BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan bahwa kondisi sarana prasarana saat ini masih sangat kurang, termasuk kondisi kantor yang baru saja pindah karena lokasi sebelumnya sering terendam banjir. Ia juga menyebutkan bahwa peralatan penyelamatan banyak yang sudah usang dan rusak, termasuk transportasi yang sering mengalami kerusakan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang mengatakan bahwa banyak peralatan sudah rusak atau bahkan hilang, seperti printer dan generator, serta sudah lama tidak ada pengadaan alat penyelamatan baru. Sekretaris BPBD juga menambahkan bahwa fasilitas seperti pelampung dan alat renang pun tidak tersedia, karena banyak peralatan hilang atau rusak akibat banjir yang melanda kantor hampir setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya sarana prasarana menghambat kemampuan BPBD dalam memberikan pelayanan maksimal saat terjadi bencana.

Selain sarana prasarana, kendala besar lainnya adalah keterbatasan alokasi dana. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa pengajuan perencanaan dana untuk BPBD sering tidak disetujui, sehingga sulit untuk melakukan pengadaan kebutuhan penting. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik menambahkan bahwa meskipun dana dari pusat memang ada, jumlahnya sangat terbatas dan tidak cukup untuk menangani kebutuhan

penanggulangan bencana di Kabupaten Malaka. Keterbatasan dana ini membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD tidak berjalan secara efektif dan efisien, khususnya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir yang membutuhkan dukungan logistik memadai.

Kelemahan lain yang cukup krusial adalah kurang lengkapnya dokumen kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD menyebutkan bahwa keterlambatan penerimaan dokumen dari desa menjadi salah satu faktor penyebab kurang efisiennya penanganan bencana. Sekretaris BPBD menjelaskan bahwa sebagian besar kepala desa tidak peduli atau tidak segera mengirimkan dokumen meskipun sudah diminta berulang kali. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menyampaikan bahwa laporan kondisi bencana dari desa sering datang terlambat, sehingga data yang tersimpan di BPBD menjadi tidak lengkap. Kurangnya dokumentasi ini berdampak langsung pada perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya menghambat efektivitas program mitigasi secara keseluruhan.

4. *Threats*

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa salah satu faktor ancaman utama dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Malaka adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan banjir. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa masyarakat di beberapa desa masih sering membuang sampah ke sungai dan enggan terlibat dalam kegiatan pembersihan. Hal ini didukung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menyatakan bahwa kehadiran masyarakat dalam sosialisasi sangat rendah, mencerminkan lemahnya perhatian mereka terhadap persoalan banjir. Camat dari beberapa kecamatan seperti Malaka Tengah, Weliman, dan Malaka Barat juga menyampaikan bahwa masyarakat masih enggan berpartisipasi dalam kerja bakti atau kegiatan kebersihan, bahkan cenderung melawan ketika diberikan teguran atau sanksi oleh aparat desa.

Selain kesadaran yang rendah, ancaman lain datang dari minimnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Malaka. Kepala Pelaksana BPBD mengakui bahwa banyak pegawai di instansinya belum melek teknologi, sehingga sulit memaksimalkan alat atau sistem yang sudah tersedia. Sekretaris BPBD menambahkan bahwa alat pendeteksi bencana sebenarnya sudah ada, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan dalam hal pelaporan dan pengelolaan data kebencanaan, Kabupaten Malaka masih tertinggal dibandingkan BPBD di daerah lain yang sudah terintegrasi dengan sistem digital nasional. Kepala bidang lainnya juga menyatakan bahwa minimnya penggunaan teknologi berpengaruh pada buruknya pelayanan kebencanaan dan kecepatan respons di lapangan.

Ancaman selanjutnya adalah kondisi geografis Kabupaten Malaka yang memang rawan terhadap bencana banjir. Dari wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD dan beberapa pejabat lainnya, diketahui bahwa wilayah ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah, yang menyebabkan air hujan mudah menggenang dan sulit meresap. Selain itu, keberadaan Sungai Benenai yang menjadi muara dari sungai-sungai di kabupaten lain turut meningkatkan risiko banjir di musim hujan karena debit air kerap meluap. Camat Malaka Timur menyampaikan bahwa banjir terjadi hampir setiap tahun dan telah menjadi masalah rutin yang sulit dihindari tanpa intervensi serius dari berbagai pihak.

Dampak dari kondisi lingkungan ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani yang mengandalkan sawah sebagai sumber utama penghasilan. Dalam wawancara, salah seorang warga menyampaikan bahwa banjir yang rutin terjadi menyebabkan sawah mereka terendam, sehingga gagal panen dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Warga berharap adanya bantuan bibit tahan banjir, pupuk gratis, dan pelatihan pertanian adaptif dari pemerintah untuk meringankan beban mereka dan menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang tidak menentu.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ancaman dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Malaka meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya pemanfaatan teknologi oleh BPBD, serta kondisi lingkungan geografis yang memang rawan banjir. Faktor-faktor ini bersumber dari luar kelembagaan BPBD namun memiliki dampak besar terhadap efektivitas strategi mitigasi yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lintas sektor, inovasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta internal BPBD agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa strategi mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malaka mengintegrasikan pendekatan struktural dan non-struktural yang ditopang oleh analisis SWOT. Dalam praktiknya, strategi tersebut melibatkan kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan regulasi, hingga pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pelatihan. Temuan ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Novend Ri Purba (2022) tentang mitigasi banjir di Kota Tebing Tinggi. Dalam penelitian tersebut, strategi mitigasi melalui pembangunan fisik seperti tanggul dan bronjong menjadi solusi utama. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan pendekatan mitigasi secara struktural dalam menangani banjir.

Namun, berbeda dengan penelitian Endah Mustika Ramdani (2015) mengenai koordinasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung yang menemukan bahwa BPBD belum mampu berfungsi optimal sebagai koordinator. Dalam konteks Kabupaten Malaka, koordinasi lintas sektor justru menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong strategi mitigasi berjalan efektif. Selain itu, temuan ini memperkuat hasil penelitian Muhammad Yusuf Badjido (2015) tentang strategi pemerintah Kabupaten Bantaeng yang menekankan pada pembangunan waduk dan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana. BPBD Kabupaten Malaka juga memiliki strategi serupa melalui kerja sama dengan Dinas PUPR dan upaya rehabilitasi lahan bersama DLH.

Penelitian ini juga menolak sebagian hasil penelitian Kusumajati (2016) di Pekalongan yang menyatakan bahwa peran masyarakat hanya sebagai penerima informasi. Temuan di Malaka justru menunjukkan adanya pelibatan aktif masyarakat dalam pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bentuk kolaborasi dan pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan strategi mitigasi bencana banjir di Malaka tidak hanya bergantung pada aspek teknis seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kepedulian masyarakat, efektivitas koordinasi antarlembaga, dan dukungan regulasi yang tepat. Ini menegaskan bahwa pengelolaan bencana yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik dan partisipatif, bukan hanya top-down.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka dalam mitigasi bencana banjir telah diterapkan dengan cukup baik melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait. Strategi ini dijalankan melalui kombinasi pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul dan saluran air, serta non-struktural seperti sosialisasi, edukasi kebencanaan, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Implementasi strategi juga diperkuat oleh analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan seperti SDM yang terlatih dan sistem kerja yang tertata, serta peluang berupa kerja sama lintas sektor dan dukungan regulatif dari desa. Meski demikian, strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pemanfaatan teknologi, dan kondisi geografis wilayah yang rawan banjir. Komitmen BPBD terhadap upaya mitigasi bencana terlihat dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat, penyusunan dokumen kebencanaan, serta keterlibatan dalam forum koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas strategi tersebut masih terhambat oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang dimiliki oleh BPBD. Rendahnya pemahaman terhadap teknologi di internal lembaga dan masyarakat juga menghambat modernisasi sistem peringatan dini dan respons bencana secara digital. **Keterbatasan Penelitian**, pertama, penelitian ini hanya dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Malaka, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Kedua, pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif sangat bergantung pada persepsi dan narasi informan, yang memungkinkan adanya bias subjektif dalam interpretasi data. Selain itu, keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen teknis dan minimnya penggunaan instrumen teknologi juga memengaruhi kedalaman data yang diperoleh. **Arah Masa Depan Penelitian**, disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup perbandingan antar wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana berbeda untuk memperkaya perspektif strategi mitigasi yang kontekstual. Kombinasi pendekatan kuantitatif juga penting untuk mengukur efektivitas program secara lebih objektif dan terukur. Selain itu, eksplorasi terhadap faktor-faktor seperti pengaruh perubahan iklim, dinamika politik lokal, ketimpangan kapasitas antarsektor, serta kesiapan teknologi di daerah tertinggal akan memperluas cakupan pemahaman dalam merancang model mitigasi bencana yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, serta seluruh staf BPBD Kabupaten Malaka yang telah memberikan waktu, data, dan wawasan berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Camat Kecamatan Malaka Tengah, Malaka Barat, Malaka Timur, dan Weliman, serta masyarakat di wilayah rawan banjir yang telah bersedia memberikan informasi dan pengalaman langsung terkait penanggulangan bencana banjir. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas segala bimbingan, ilmu, dan dukungannya. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan

semangat dan doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aqim, B. S., & Pujayanti, L. P. V. A. (2024). Program desa tangguh bencana dalam kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Kejajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).

At Thariq, M. B., & Madjid, M. P. (2024). Network governance dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, IPDN).

Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. Environmental Chemistry Letters, 18, 2069–2094. https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w

Fahrur Lukito, A., & Suharjo, M. S. (2014). Mitigasi bencana banjir di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Grothmann, T., & Reusswig, F. (2006). People at risk of flooding: Why some residents take precautionary action while others do not. Natural Hazards, 38, 101–120. https://doi.org/10.1007/s11069-005-8604-6

Haines, A., Kovats, R. S., Campbell-Lendrum, D., & Corvalan, C. (2006). Climate change and human health: Impacts, vulnerability and public health. Public Health, 120(7), 585–596. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.01.002

Kahn, M. E. (2005). The death toll from natural disasters: The role of income, geography, and institutions. The Review of Economics and Statistics, 87(2), 271–284. https://doi.org/10.1162/0034653053970339

Kusumajati, L., & Sri Arfiah, S. H. (2016). Peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Nasyiruddin, M., & Badjido, M. Y. (2015). Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 157–173.

Purba, N. (2017). Strategi mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Jurnal TRANSUKMA, 2(02).

Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi oleh BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 12(3), 383–406.

Rusfiana, Y., & Lestari, M. N. (2021). Strategi antisipasi potensi bencana alam di Kabupaten Bandung. Jurnal Konstituen, 3(1).

Surya, I., Suhardi, M., & Wahab, A. (2020). Edukasi sadar bencana kekeringan dan kesiapsiagaan warga masyarakat dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Syapmi, M., & Jeddawi, M. (2024). Implementasi Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 dalam penggunaan dana desa terkait kebencanaan (Studi kasus Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, IPDN).

Van Dongeren, A., Ciavola, P., Viavattene, C., de Kleermaeker, S., Martinez, G., Ferreira, O., Costa, C., & McCall, R. (2014). RISC-KIT: Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT. Journal of Coastal Research, 70(sp1), 366–371.

https://doi.org/10.2112/SI70-062.1